

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN (Studi Kasus Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo)

Peoples Perception and Participation of Forest Resources.

(Case Study in Bukit Barisan Great Forest Park, Sibayak II Forest Area, Karo District).

Rena Novelia Damanik¹, Oding Affandi², Liliek Pudji Asmono²

¹*Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara Jl. Tri Dharma Ujung No. 1 Kampus USU Medan 20155 (*Penulis korespondensi, E-mail: rena.damanik@yahoo.com)*

²*Dosen Pembimbing Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara Jl. Tri Dharma Ujung No. 1 Kampus USU Medan 20155*

Tahura Bukit Barisan has good variety potentials to be developed. However, Tahura Bukit Barisan's management can not get maximal result if the rate of human's perception and participation haven't been known yet. Whereas, the rate of people's perception and participation in existing can be base for UPT Tahura Bukit Barisan manager to empower community, so that they will be more active in managing and using forest potency. So, the rate of community perception and participation of Tahura Bukit Barisan have to been known. Sampling technique uses purposive sampling. This research uses primer and secondary data. Primer data collected from survey and direct interview by quisioner. Then, counted the rate of community perception and participation by using formula, then it will be grouped into three categories namely high, medium and low. The result showed the level of peoples in Dolat Rayat, Jarang Uda and Merdeka Village are grouped into good perception, but rate of community participation for some activities such as planning, actuating, and evaluation are low.

Keyword : Tahura Bukit Barisan, Perception, Participation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan merupakan Tahura ketiga di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 48 Tahun 1988 tanggal 19 November 1988. Pembangunan Taman Hutan Raya Bukit Barisan ini sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan melalui peningkatan fungsi dan peranan hutan. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah unit pengelolaan yang berintikan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dengan luas seluruhnya 51.600 Ha (Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, 2002).

Tahura Bukit Barisan sebagian besarnya merupakan hutan lindung berupa hutan alam pegunungan yang ditetapkan sejak jaman Belanda, meliputi Hutan Lindung Sibayak I dan Simancik I, Hutan Lindung Sibayak II dan Simancik II serta Hutan Lindung Sinabung. Bagian lain kawasan Tahura ini terdiri dari Cagar Alam (CA)/Taman Wisata (TW) Sibolangit, Suaka Margasatwa (SM) Langkat Selatan, TW Lau Debuk-debuk dan Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit (Balai Konservasi Sumberdaya Alam I, 1999).

Pada beberapa kawasan hutan lindung, interaksi antar masyarakat lokal dengan sumber daya alam masih sangat kuat. Bahkan di beberapa lokasi, pola interaksi yang terjalin memberikan kecenderungan positif terhadap kelestarian hutan (MacKinnon, *et al*, 1990). Seperti halnya Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang seharusnya perlu dijaga dan dipertahankan secara lestari. Namun seiring berjalannya waktu, luasan hutan

di Indonesia mulai berkurang dan hal ini tidak terlepas dari masyarakat. Posisi masyarakat ibarat pedang bermata dua yaitu masyarakat bisa sebagai pelindung dan bisa juga sebagai perusak. Hal inilah yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian mengenai persepsi dan partisipasi (perilaku) masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan sehingga dapat memberikan masukan baik kepada pihak UPT Pengelola Balai Tahura Bukit Barisan maupun kepada masyarakat sekitar Tahura Bukit Barisan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Perumusan Masalah

Tahura Bukit Barisan memiliki beranekaragam potensi yang baik untuk dikembangkan. Namun pengelolaan Tahura Bukit Barisan belum dapat mencapai hasil yang maksimal jika tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat belum diketahui. Berdasarkan hasil survei awal diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo tidak terlepas dari masyarakat. Hasil pencatatan data pelanggaran tahun 2012 yang terjadi di kawasan Tahura Bukit Barisan dapat dilihat bahwa kawasan hutan sibayak II merupakan kawasan yang sering ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian kayu dan pengambilan humus, bahkan yang melakukan pelanggaran tersebut ialah masyarakat sekitar Tahura Bukit Barisan itu sendiri. Jadi, dengan diketahuinya persepsi dan partisipasi masyarakat yang ada sekarang dapat menjadi pedoman bagi UPT

Pengelola Tahura Bukit Barisan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara lestari serta dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan hutan. Hal inilah yang mendasari perlunya diketahui persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kawasan Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo
2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran berbagai pihak akan pentingnya keberadaan sumber daya hutan
2. Memberikan masukan bagi instansi seperti Dinas Kehutanan dan Balai Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo serta masyarakat lokal sekitar Tahura Bukit Barisan agar dapat mengelola sumber daya hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian hutan.

Aspek-aspek yang Diteliti

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan tentang perlu tidaknya dijaga dan dilestarikan keberadaan hutan, kondisi Tahura Bukit Barisan tentang ada tidaknya terjadi konversi hutan, perambahan hutan, penebangan liar, kelembagaan pengelolaan Tahura Bukit Barisan tentang struktur atau *hierarki* organisasi UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan dan hubungan kerjasama antara pihak UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan dengan pihak lain dalam mengelola hutan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan tentang ada tidaknya hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola hutan, fungsi dan manfaat Tahura Bukit Barisan tentang ada tidaknya fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan tentang bersedia tidaknya masyarakat dilibatkan atau terlibat dalam mengelola hutan, keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan tentang ada tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan seperti *illegal logging*, pemburuan satwa liar, dan lain-lain, sikap/*attitude* masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan tentang bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi setiap kegiatan pengelolaan hutan

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Desa Dolat Rayat, Desa Jarang Uda dan Desa Merdeka dalam perencanaan kegiatan yaitu hadir dalam pertemuan untuk merencanakan kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Barisan dan memberi usulan atau ide untuk

kelancaran di lapangan, pelaksanaan kegiatan yaitu mengikuti pelatihan dari pihak UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan, penanaman bibit di lapangan serta penangkaran satwa, evaluasi kegiatan berupa pelaporan hasil survei tanaman di lapangan setelah penanaman

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo. Penelitian dilakukan pada bulan April 2013 – Juni 2013.

Prosedur Penelitian

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Dolat, Desa Jarang Uda dan Desa Merdeka.

Banyaknya sampel (responden) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 KK pada masing-masing desa. Hal ini karena didasarkan pada Koentjaraningrat (1993) yang menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai berapa besar sampel yang diisyaratkan dalam suatu penelitian. Namun homogenitas sampel dan analisis data yang digunakan menentukan besarnya sampel. Jika populasi sampel homogen jumlah sampel tidak menjadi persoalan, untuk analisis statistik parametrik memerlukan data yang relatif besar (minimal 30), sedangkan untuk analisis statistik nonparametrik cukup menggunakan data yang relatif kecil.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil survei dan observasi langsung di lapangan serta wawancara melalui penyebaran kuisioner. Untuk melengkapi kuisioner yang disebarkan kepada masyarakat maka dilakukan wawancara (*deep interview*) kepada beberapa informan kunci. Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data-data yang sudah tersedia.

Analisis Data

a. Persepsi Masyarakat

Data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara (*deep interview*) kepada beberapa informan kunci dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Dolat Rayat, Desa Jarang Uda, dan Desa Merdeka terhadap Tahura Bukit Barisan.

b. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dinilai berdasarkan skor melalui keterlibatan masyarakat Desa Dolat Rayat, Desa Jarang Uda dan Desa Merdeka dalam berbagai program kegiatan, diantaranya partisipasi dalam tahap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (evaluasi)

terhadap Tahura Bukit Barisan. Data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner disajikan dalam bentuk tabulasi. Kemudian dilakukan perhitungan persentase partisipasi dengan menggunakan rumus (Daniel, 2002) :

$$P(\%) = \frac{ni}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Persentase partisipasi
 ni = Jumlah sampel pada kategori- *i*
i adalah kategori tinggi, sedang, dan rendah
 N = Jumlah seluruh sampel

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi) Tahura Bukit Barisan dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Untuk jawaban dengan tingkat partisipasi tinggi berada pada interval skor 66,68-100
- Untuk jawaban dengan tingkat partisipasi sedang berada pada interval skor 33,34-66,67
- Untuk jawaban dengan tingkat partisipasi rendah berada pada interval skor 0-33,33

(Daniel, 2002).

Berdasarkan perhitungan data yang di atas, data dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat Desa Dolat Rayat, Desa Jarang Uda, dan Desa Merdeka dalam dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi) Tahura Bukit Barisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

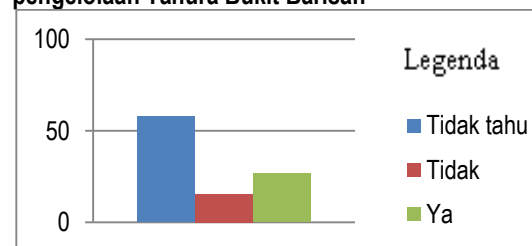
Persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan

Persepsi masyarakat Desa Dolat Rayat, Desa Jarang Uda, dan Desa Merdeka terhadap Tahura Bukit Barisan dapat digolongkan ke dalam kategori persepsi baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ngakan, dkk (2006) yang menyatakan bahwa persepsi baik, apabila mereka memahami dengan baik bahwa dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan dan menginginkan agar sumberdaya tersebut dikelola secara lestari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh responden sudah jarang bahkan tidak pernah lagi masuk ke dalam kawasan Tahura Bukit Barisan. Dengan kata lain bahwa interaksi antara masyarakat dengan sumber daya hutan sudah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu aktivitas masyarakat (pekerjaan) dan lama bermukim. Mayoritas pekerjaan masyarakat ialah sebagai petani sehingga masyarakat menjadi lebih fokus melakukan kegiatan di lahan pertanian baik itu di lahan pribadi maupun buruh petani di lahan milik oranglain. Selain itu, masyarakat lokal hanya sebagian kecil bermukim lebih dari 60 tahun sehingga persepsi mengenai keberadaan Tahura Bukit Barisan masih minim. Tentu saja masyarakat yang bermukim kurang dari 60 tahun akan memiliki

pengalaman berinteraksi dengan sumber daya hutan lebih rendah daripada masyarakat lokal yang bermukim lebih dari 60 tahun. Walaupun demikian, masyarakat mengakui masih memiliki kepentingan terhadap sumber daya hutan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai sumber mata air, penghasil udara yang bersih bahkan disebut sebagai paru-paru dunia, pengatur iklim, dan mencegah bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa keberadaan Tahura Bukit Barisan sangat penting. Maka dari itu, masyarakat dan hutan tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang ditampilkan mengenai persepsi masyarakat terhadap sumber daya hutan antara lain persepsi tentang peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, kondisi Tahura Bukit Barisan, kelembagaan pengelolaan Tahura Bukit Barisan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, fungsi dan manfaat Tahura Bukit Barisan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan, sikap/*attitude* masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan.

Persepsi masyarakat terhadap peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan

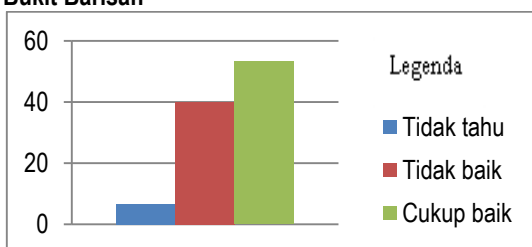


Gambar 1, Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Peraturan Dalam Pengelolaan Tahura Bukit Barisan

Mengenai pertanyaan tentang peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, hanya 26,67% responden yang tahu tentang peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan. Para responden menjawab bahwa peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan antara lainadanya undang-undang kehutanan yang mengatur bahwa hutan lindung harus dijaga dan dilestarikan, tidak ada penebangan liar, pengambilan humus. Namun, 57,77% responden tidak tahu sama sekali mengenai peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat tentang hutan dan 15,56% responden ragu-ragu terhadap pengetahuan mereka mengenai peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan. Penyebabnya tidak jauh beda dengan responden yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan yaitu disebabkan oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang hutan sangat rendah. Tinggi rendahnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hutan juga dipengaruhi oleh pendidikan terakhir yang

diemban oleh masyarakat yaitu sebanyak 48,89% masyarakat lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA).

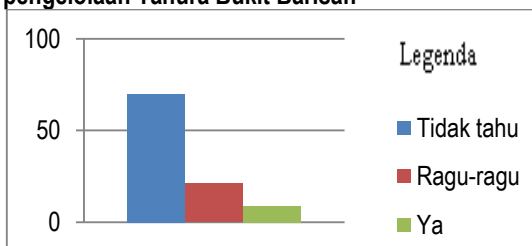
Persepsi masyarakat terhadap kondisi Tahura Bukit Barisan



Gambar 2. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Kelembagaan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan

Pada pertanyaan mengenai kondisi Tahura Bukit Barisan yang dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa terdapat 53,33% responden memiliki persepsi bahwa kondisi Tahura Bukit Barisan cukup baik. Masyarakat mengatakan kondisi Tahura Bukit Barisan cukup baik karena adanya perlindungan hutan dan hutan masih terawat dengan baik. Namun 6,67% responden tidak tahu bagaimana kondisi Tahura Bukit Barisan karena adanya aktivitas lain yang dianggap lebih penting sehingga menyebabkan sikap kurang peduli terhadap hutan di sekitarnya dan 40% responden memiliki persepsi yang berbeda yaitu kondisi Tahura Bukit Barisan tidak baik disebabkan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pembalakkan liar dan adanya polusi.

Persepsi masyarakat terhadap kelembagaan pengelolaan Tahura Bukit Barisan

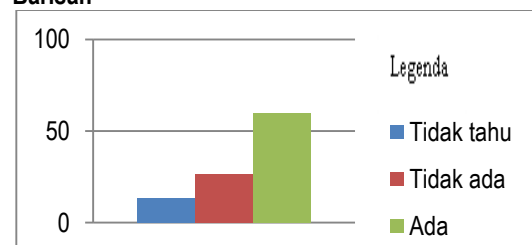


Gambar 3. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Kelembagaan Pengelolaan Tahura Bukit Barisan

Persepsi masyarakat sebagian besar yaitu sebanyak 70% responden tidak tahu sama sekali mengenai kelembagaan pengelolaan Tahura Bukit Barisan. Pekerjaan masyarakat yang mayoritas sebagai petani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan semakin berkurang atau kurang terlalu memperhatikan hutan karena mereka berpendapat bahwa mengelola lahan pertanian lebih menguntungkan daripada hutan karena dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga masing-masing. Selain itu, ada juga 21,11% responden

menjawab ragu-ragu terhadap kelembagaan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan karena masyarakat belum pernah datang ke Tahura Bukit Barisan. Namun, 8,89% responden mengatakan bahwa UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan merupakan wadah atau tempat penyampaian inspirasi masyarakat untuk melestarikan hutan yang dikepalai oleh seorang kepala UPT beserta anggotanya namun dalam pengelolaannya bahwa UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, namun ada juga persepsi masyarakat mengatakan bahwa pihak UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan bekerja sama dengan beberapa pihak lain dalam mengelola Tahura Bukit Barisan seperti Dinas Kehutanan, Kelompok Tani Mitra Tahura, Kelompok Tani Usait.

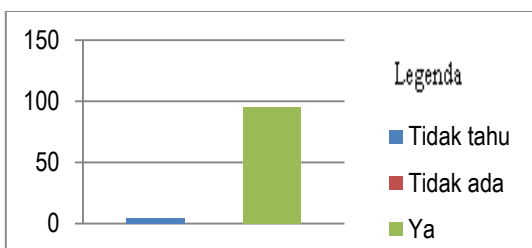
Persepsi masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan



Gambar 4. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Tahura Bukit Barisan

Mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola Tahura Bukit Barisan, sebanyak 60% responden memiliki persepsi bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yaitu antara lain haknya ialah hak pemanfaatan hasil hutan dan kewajibannya ialah menjaga serta melestarikan hutan. Sedangkan 26,67% responden mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola Tahura Bukit Barisan karena memiliki pemikiran bahwa masyarakat tidak memiliki wewenang dalam mengelolanya dan sudah ada pihak-pihak tertentu yang bertugas menjaga dan mengelola kawasan Tahura Bukit Barisan. Selebihnya yaitu 13,33% responden tidak tahu mengenai apakah ada hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada memperhatikan lingkungan dan hutan sekitar.

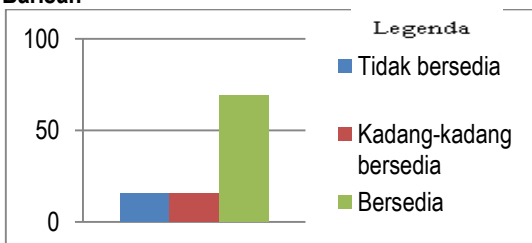
Persepsi masyarakat terhadap fungsi dan manfaat Tahura Bukit Barisan



Gambar 5. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Fungsi dan Manfaat Tahura Bukit Barisan

Tingkat persepsi responden mengenai fungsi dan manfaat Tahura Bukit Barisan dapat dikatakan tergolong cukup baik dikarenakan bahwa hampir semua responden mengetahui bahwa hutan tersebut sangat bermanfaat dan memiliki fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 95,55% responden memiliki persepsi yang kuat dan cukup jelas mengenai fungsi dan manfaat sumber daya hutan yaitu pengaturan tata air, paru-paru dunia, mencegah bencana alam, mengurangi polusi atau pencemaran bahkan dapat dijadikan sebagai objek wisata (fungsi ekonomi). Namun, 4,44% responden tidak tahu apakah Tahura Bukit Barisan bermanfaat atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan yaitu minimnya pengetahuan dan sikap peduli terhadap hutan di sekitarnya.

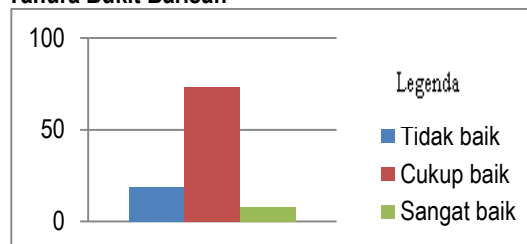
Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan



Gambar 6. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Tahura Bukit Barisan

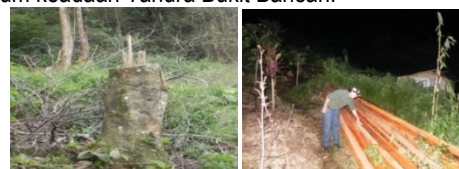
Keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan dapat dilihat pada Gambar 6 yaitu sebanyak 68,89% responden bersedia terlibat atau dilibatkan dalam mengelola Tahura Bukit Barisan karena masyarakat tersebut memiliki persepsi bahwa hutan sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan karena menganggap hutan sebagai sumber kehidupan. Namun ada juga 15,56% responden yang kadang-kadang bersedia dan 15,56% responden yang tidak bersedia dilibatkan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain umur yang tidak memungkinkan lagi untuk ikut serta terlibat atau dilibatkan dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan dan adanya aktivitas lain dan pekerjaan yang menyebabkan kurangnya waktu untuk ikut serta dalam mengelola hutan.

Persepsi masyarakat terhadap keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan



Gambar 7. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Keamanan Kawasan Tahura Bukit Barisan

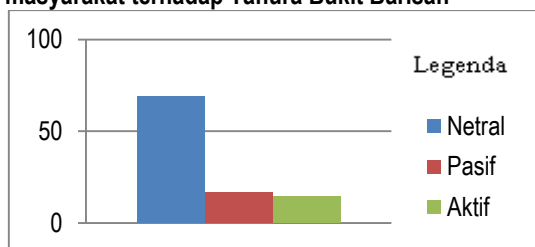
Persepsi masyarakat mengenai kawasan Tahura Bukit Barisan dari segi keamanan sebanyak 73,33% responden mengatakan cukup baik. Keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan dikatakan cukup baik karena masyarakat melihat dari segi penjagaan yang dilakukan terhadap kawasan Tahura Bukit Barisan cukup baik dan ketat sehingga dapat meminimalisasikan terjadinya pelanggaran dan tidak pernah menimbulkan keributan. Sedangkan ada juga 18,89% responden yang berpendapat bahwa keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan tidak baik. Masyarakat memiliki persepsi seperti itu karena masih ada penebangan liar bahkan pengambilan humus di dalam kawasan. Namun ada juga masyarakat yaitu sebanyak 7,77% responden yang mengatakan bahwa keamanan kawasan Tahura Bukit Barisan sangat baik dikarenakan masyarakat tersebut hanya melihat secara umum keadaan Tahura Bukit Barisan.



Gambar 8. Penebangan kayu Gambar 9. Pencurian kayu

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hutan maka intensitas terjadinya pelanggaran sudah menurun, misalnya dalam pengambilan humus. Sebelumnya hampir seluruh masyarakat masuk ke dalam kawasan untuk mengambil humus untuk lahan pertanian masing-masing namun sekarang pelanggaran mengambil humus sudah sangat berkurang. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengetahuan masyarakat bahwa tidak hanya dengan humus dapat menyuburkan tanaman namun dapat diganti dengan yang lain seperti pupuk kandang (kompos) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hutan bagi masyarakat misalnya sebagai sumber mata air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun dengan demikian, masyarakat masih kurang peduli terhadap Tahura Bukit Barisan (Gambar 10).

Persepsi masyarakat terhadap sikap/attitude masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan

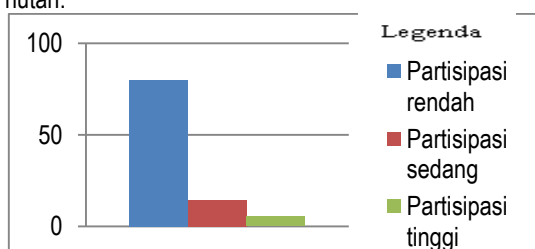


Gambar 10. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Sikap/Attitude Masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan

Dari hasil penelitian, masyarakat mengakui bahwa kurangnya perhatian terhadap hutan baik dalam menjaga maupun mengelola hutan secara lestari. Sebanyak 68,89% responden memiliki sikap netral sejauh mereka tidak mengganggu dan merusak sumber daya hutan. Ada juga 16,67% responden bersikap pasif karena masyarakat memiliki persepsi bahwa dalam mengelola hutan dibutuhkan dana yang cukup besar sehingga harus menunggu perintah dari pihak-pihak yang terkait guna mengatasi dana tersebut sedangkan 14,44% responden bersikap aktif. Masyarakat ini ialah masyarakat yang peduli terhadap hutan dan terlibat langsung atau telah menjalin kerjasama dengan pihak UPT Tahura Bukit Barisan dalam mengelola hutan.

Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu tahap awal dan proses yang penting dari suatu kegiatan. Perencanaan juga menjadi pondasi atau titik tolak dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pada tahap kegiatan perencanaan ini masyarakat melakukan pertemuan antar warga desa atau rapat mengenai pengelolaan hutan.



Gambar 11. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Perencanaan Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden yang masuk pada kategori rendah adalah sebesar 80% (Gambar 11). Kategori rendah yang dimaksud adalah partisipasi responden dalam kegiatan perencanaan tidak ada sama sekali seperti tidak pernah hadir dalam pertemuan atau rapat membahas perencanaan Tahura Bukit Barisan bahkan menyumbangkan ide-ide atau materi dalam pertemuan. Berdasarkan pada Gambar 11 diketahui terdapat

14,44% responden memiliki partisipasi sedang pada perencanaan Tahura Bukit Barisan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini tidak maksimal, dapat dinilai dari kehadiran responden yang tidak selalu hadir dalam pertemuan atau rapat dan responden yang termasuk dalam kategori tinggi sangat sedikit yaitu sebesar 5,55%. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan untuk mengelola hutan rendah dikarenakan kurangnya pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat.

Masyarakat tahu bahwa keberadaan Tahura Bukit Barisan tersebut sangat penting dan bermanfaat terutama untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak jarang masyarakat merasakan manfaat hutan baik secara langsung maupun tidak langsung namun dengan meningkatnya aktivitas yang diemban oleh masyarakat, rasa kepedulian masyarakat terhadap hutan menurun.

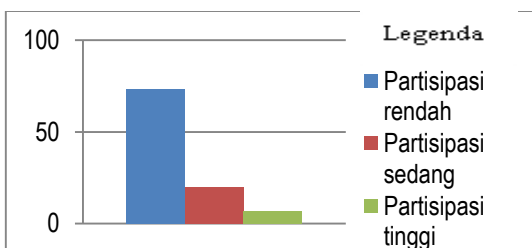
Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam tahap kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan hutan yaitu berupa kegiatan penanaman beberapa bibit pohon yaitu ingul (*Toona sureni*), pinus (*Pinus merkusii*), rasamala (*Altingia excelsa*), pupsa (*Schimawallichii*), hapas-hapas (*Exbucklandia populnea*), sampinur (*Dacrydium junghuhni*), bibit MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) yaitu durian (*Durio zibethinus*), alpokat (*Perseae fructus*), kemiri (*Aleurites moluccana*), aren (*Arenga pinnata*), dan bambu (*Bamboo spp.*) yang ditanam di sekitar sumber mata air.



Gambar 12. Penangkaran Kupu-kupu di Tahura Bukit Barisan

Kegiatan penanaman ini dilakukan atas kerjasama antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak tertentu seperti Dinas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara dan beberapa komunitas pemerhati lingkungan. Kegiatan ini berupaya merehabilitasi kawasan Tahura Bukit Barisan yang telah rusak akibat penebangan liar, pengambilan humus dan perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat potensi flora dan fauna yang terdapat di Tahura Bukit Barisan sangat beranekaragam untuk dijaga dan dilestarikan maka UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan dan masyarakat sekitar yaitu kelompok tani mitra Tahura berinisiatif untuk melakukan kegiatan penangkaran kupu-kupu. Kegiatan penangkaran ini dilakukan di kawasan Tahura Bukit Barisan (Gambar 12).

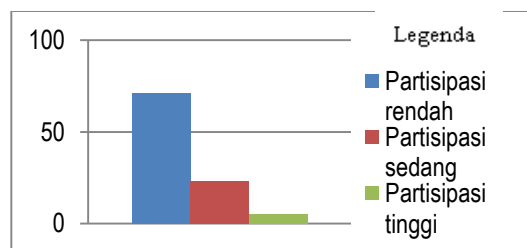


Gambar 13. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Pelaksanaan Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo

Berdasarkan Gambar 13 diketahui bahwa sebanyak 73,34% responden termasuk dalam kategori rendah. Partisipasi masyarakat yang termasuk dalam kategori sedang adalah sebesar 19,99% yaitu responden yang tidak selalu ikut hadir dalam kegiatan pelaksanaan Tahura Bukit Barisan, dan responden yang masuk dalam kategori tinggi adalah sebesar 6,67%. Dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan Tahura Bukit Barisan.

Partisipasi Masyarakat pada Tahap Kegiatan Evaluasi

Pada tahap ini dapat diketahui apakah kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Kegiatan penilaian atau evaluasi tersebut berbentuk laporan hasil dari kegiatan di lapangan, antara lain pelaporan mengenai keberhasilan tanaman yang tumbuh termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Partisipasi responden dalam kegiatan penilaian atau evaluasi dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14 Partisipasi Responden dalam Kegiatan Evaluasi Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo

Berdasarkan pada Gambar 15 dapat diketahui bahwa 71,1% responden masuk ke dalam kategori rendah, yaitu masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian atau evaluasi Tahura Bukit Barisan. Tingkat partisipasi masyarakat yang masuk ke dalam kategori sedang dan tinggi secara berturut-turut adalah sebesar 23,34% dan 5,55%. Hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat ataupun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi masih rendah. Para responden ini masih belum begitu paham tentang pentingnya mengukur keberhasilan tanaman yang telah ditanam, sehingga sedikit acuh tak acuh terhadap kegiatan pemeliharaan tanaman setelah proses pelaksanaan di lapangan.

Pihak balai Tahura Bukit Barisan juga masih kurang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tujuan dilakukan kegiatan evaluasi atau penilaian. Tujuan dari kegiatan penilaian atau evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan dari program Tahura Bukit Barisan sekaligus untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan kegiatan tersebut kurang lancar serta mencari solusinya. Tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahap antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi) juga dapat dilihat dari jumlah responden yang hadir dalam setiap kegiatan (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Kehadiran Responden pada Setiap Tahap Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Tahura Bukit Barisan

| Desa | Tahap | Jenis Kegiatan | Σ Responden (orang) | |
|-------------|-------------|---|---------------------|-------|
| | | | Ya | Tidak |
| Dolat Rayat | Perencanaan | Pertemuan antar warga desa Dolat Rayat | 12 | 18 |
| | Pelaksanaan | Penanaman, penangkaran kupu-kupu | 18 | 12 |
| | Evaluasi | Pelaporan hasil kegiatan antara pengurus dengan warga | 4 | 26 |
| Jarang Uda | Perencanaan | Pertemuan antar warga desa Jarang Uda | 6 | 24 |
| | Pelaksanaan | Penanaman | 4 | 26 |
| | Evaluasi | Pelaporan hasil kegiatan antara pengurus dengan warga | 2 | 28 |
| Merdeka | Perencanaan | Pertemuan antar warga desa Merdeka | 4 | 26 |
| | Pelaksanaan | Penanaman | 1 | 29 |
| | Evaluasi | Pelaporan hasil kegiatan antara pengurus dengan warga | 3 | 27 |

Berdasarkan pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Partisipasi masyarakat rendah bukan hanya disebabkan oleh pekerjaan, usia dan kurangnya sosialisasi pihak UPT. Pengelola Tahura Bukit Barisan

kepada masyarakat tetapi juga karena sikap individu masyarakat itu sendiri cuek terhadap sekitar. Namun, untuk mengelola Tahura Bukit Barisan diperlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan pelaksanaan, perencanaan dan penilaian (evaluasi) masuk ke dalam kategori rendah yaitu masyarakat mengakui bahwa mereka masih memiliki kepentingan dengan hutan untuk kebutuhan sehari-hari namun masyarakat memiliki pemahaman bahwa sudah ada pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang untuk mengelola hutan secara lestari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ngakan, dkk (2006) yang menyatakan bahwa berpartisipasi pasif ialah apabila mereka berpikir bahwa harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya hayati hutan di sekitar kampung mereka, tetapi mereka tidak pernah terlibat aktif dan berharap agar pemerintah atau pihak lain yang melakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa hubungan antara persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan dengan tingkat partisipasinya dalam setiap kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Barisan negatif. Dalam hal ini negatif ialah hubungan persepsi masyarakat tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan baik tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Barisan rendah. Namun, pada kenyataannya, persepsi yang baik belum tentu dapat meningkatkan partisipasi. Hal ini bisa dilihat pada persepsi masyarakat yang positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan yaitu sebagian besar masyarakat (68,89%) bersedia dilibatkan atau pun terlibat dalam mengelola hutan namun dalam prakteknya masyarakat tidak aktif dalam setiap kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Barisan..

Mengacu kepada hasil survei awal dan penyebaran kuisioner serta wawancara kepada beberapa informan kunci terlihat bahwa perilaku aktivitas masyarakat yang ada di kawasan Tahura Bukit Barisan tidak terlepas dari sumber daya hutan yaitu sebagian masyarakat melakukan perladangan, sawah (budidaya) di sekitar kawasan Tahura Bukit Barisan bahkan terjadinya konversi hutan. Indikasi gangguan tersebut didasarkan kepada amanat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang mengatakan bahwa pada kawasan lindung tidak boleh berlangsung aktivitas budidaya. Sehingga usulan model atau pola pengelolaan kawasan Tahura Bukit Barisan ialah titik awal pengelolaan diawali dari aspek kelembagaan yaitu upaya untuk meningkatkan peran dan kerja sama yang berkesinambungan antar pelaku pembangunan terkait (*stakeholder*) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk itu, berbagai peraturan hukum di bidang kehutanan hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu pengelolaan hutan secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Persepsi masyarakat terhadap Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo tergolong pada persepsi baik
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo berada pada kategori rendah, dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang rendah dalam setiap jenis kegiatan.

Saran

Untuk memperoleh keberhasilan kegiatan pelestarian Tahura Bukit Barisan diharapkan agar pihak UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan lebih serius menangani dan lebih sering melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaannya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik melalui pendekatan-pendekatan dengan masyarakat maupun kelompok tani yang ada dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat desa tentang arti pentingnya kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta.
- Ayunita, D dan Trisnani, D. H. 2012. Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Pada Pengelolaan KKLD Ujungnegoro Kabupaten Batang. Universitas Diponegoro. Semarang
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Medan. 1999. Informasi Kawasan Konservasi Propinsi Sumatera Utara. Bali Scan dan Percetakan. Medan.
- Chadwick, B., Howard M. B., and Stan L. A. 1991. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP Semarang.
- Damanik, J. dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata : Dari Teori ke Aplikasi. Edisi I. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Daniel, M. 2002. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2013.
- Djohani, R. 1996. Berbuat Bersama Berperan Setara. Studio Driya Media. Bandung.
- Effendi, I. 2002. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Taman Nasional Gunung Leuser d Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal 5.
- Irwan, Z. D. 1992. Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1993. Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling Dalam Penelitian Masyarakat. Dalam: Koentjaraningrat (Eds).

1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Komite PPA-MFP. 2006. Kemitraan dalam Pengelolaan Taman Nasional : Pelajaran untuk Transformasi Kebijakan. Yayasan WWF-Indonesia.
- Laporan Tahunan UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
- MacKinnon, J.K, G. Child, J. Thorsell. 1990. Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Mappamiring. 2005. Kebijakanaksanaan Pengembangan Kelembagaan Dalam Pengembangan Strategi Dan Teknologi Pengembangan Kawasan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik/Volume 1/No.1/2005.
- Mikkelsen,B. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Posman, J. 2007. Pengelolaan Kawasan Konservasi. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Nazir M. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia;Bogor
- Ngakan, Putu Oka., H. Komarudin, A. Achmad, Wahyudi, dan A.Tako. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. CIFOR. Jakarta.
- Nugraha, A. dan Murtijo. 2005. Antropologi Kehutanan. Wana Aksara. Banten.
- Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan. 2002. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- Rakhmat, J. 1992. Psikologi Kemanusiaan. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Tannenbaum, R., Chris, A., Rensis, L., F, Massarik., Keith, D., Robert, L. K. 1992. Partisipasi dan Dinamika Kelompok. Dahara Prize. Semarang.
- Thaha, R. 2010. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Jurnal Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah.
- Umar. 2009. Persepsi dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air (Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang). Tesis.Undip. Semarang.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Wibowo, I. 1998. Psikologi Sosial. Universitas Terbuka. Karunika. Jakarta.
- Yulianti, Y. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Mandiri Perkotaan Di Kota Solok.Artikel. Universitas Andalas. Padang.